

**THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM ON  
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN SECRETARIAT OF REGIONAL  
HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) OF WEST JAVA PROVINCE**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SEKRETARIAT  
DPRD PROVINSI JAWA BARAT**

**Kansha Datik Jurnalistiati<sup>1</sup>, Neni Maryani<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani<sup>1,2</sup>

[kanshadatik\\_2360107020@ak.unjani.ac.id](mailto:kanshadatik_2360107020@ak.unjani.ac.id)<sup>1</sup>, [neni.maryani@lecture.unjani.ac.id](mailto:neni.maryani@lecture.unjani.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*In enhancing performance, transparency, and accountability in state financial management, an internal control system must be implemented comprehensively within the government environment, as stipulated in Article 58, paragraph (1) of Law of the Republic Indonesia No. 1 of 2004 on State Treasury, including within local governments. This research aims to identify and examine the influence of the internal control system on regional financial management by taking a sample of 30 employees in the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Java Province. This study is a quantitative research with a case study approach. The research data were obtained through documentation, observation, questionnaires, and literature study. The results of the study indicate that the Government Internal Control System (SPIP) has a positive influence on regional financial management in the Secretariat of the DPRD of West Java Province, meaning that the better the government internal control system, the better the regional financial management.*

**Keywords:** Government Internal Control System (SPIP), Regional Financial Management.

**ABSTRAK**

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh sesuai yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan mengambil sampel sebanyak 30 pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi, observasi, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, berarti semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerahnya.

**Kata kunci:** Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah.

**PENDAHULUAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, timbul hak

dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.”. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di mana DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pembantu DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, BPK memberikan catatan terkait perjalanan dinas, kesalahan umur ekonomis aset, dan pemeliharaan aset. Dilansir dari JabarEkspres.com, terdapat proyek perbaikan basement kantor DPRD Jawa Barat yang semestinya bisa dilakukan melalui tender atau lelang tetapi justru dipecah menjadi enam paket pengadaan langsung. Akibatnya, proyek tersebut memiliki catatan kelebihan pembayaran dan pemborosan anggaran karena pembayaran lebih mahal (Pratiwi, 2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat belum memadai.

Menurut Teori Agensi, pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk menyampaikan kinerjanya kepada rakyat sebagai prinsipal dan mengelola keuangannya secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Dalam rangka mencapai hal tersebut, perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan seperti yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.” dan Pasal 219 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah.”

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pujiono et al. (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Maluku Utara, adanya sistem pengendalian internal yang sesuai dengan tujuan dalam memajukan pembangunan daerah akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Sari et al. (2021) menemukan bahwa bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan di BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Hanafiah et al. (2016) dan Rachmayanti (2016) yang menyebutkan bahwa pengawasan/pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, menurut Ledo dan Ayem (2017) pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat; (2) mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan; (3) mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah asosiatif bentuk kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Terdapat variabel yang mempengaruhi (independen) dan dipengaruhi (dependen) (Sugiyono, 2020, hal. 66).

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian dilaksanakan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dalam jangka waktu mulai bulan September 2024 sampai dengan selesai.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, baik pegawai ASN maupun Non ASN sejumlah 221 orang. Kemudian, pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020, hal. 133). Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini adalah pegawai yang kompeten dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga diperoleh 30 orang sebagai sampel sebagai berikut.

**Tabel 1 Daftar Sampel Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Bagian Program dan Keuangan	1
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Program dan Keuangan	3
3.	Bendahara Pengeluaran	1
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	4
5.	Verifikator Keuangan	2
6.	Pengelola Gaji	2
7.	Perencana Ahli Pertama	1
8.	Analisis Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi	1
9.	Pengelola Data	1
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	1
11.	Penyusun Laporan Keuangan	1
12.	Pengolah Data	1
13.	Tenaga Teknis Administratif Non PNS	11
<b>Total Sampel</b>		<b>30</b>

**Sumber: Data yang diolah tahun 2024**

#### Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen (terikat) dan variabel dependen (bebas). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemerintah yang

diwakilkan dengan simbol (X). Sementara itu, Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang diwakilkan dengan simbol (Y). Indikator masing-masing variabel kemudian dijelaskan dalam tabel operasional variabel sebagai berikut.

**Tabel 2 Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator
1.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X)	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan (PP No. 60 Tahun 2008)

No	Variabel	Indikator
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	1. Efisien 2. Ekonomis 3. Efektif 4. Transparan 5. Bertanggung jawab 6. Keadilan (Sumarsono, 2015, hal.58) dan (Rachmayanti, 2016)

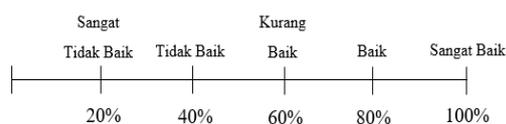
Sumber: Data yang diolah tahun 2024

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah melalui penelitian lapangan dengan dokumentasi, observasi, dan penyebaran kuesioner, serta melalui studi kepustakaan baik secara langsung maupun menggunakan internet.

### Instrumen Penelitian

Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang variabel penelitian dengan skala 1-5. Dari jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner yang dinyatakan dalam skala likert, kemudian ditentukan interval nilai untuk pengklasifikasian kriteria sebagai berikut.



### Teknik Analisis Data

Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel, instrumen penelitian diuji validitasnya menggunakan rumus korelasi Produk Moment (*Pearson Correlation*) dan reliabilitasnya menggunakan Teknik Belah Dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus *Spearman Brown*. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS versi 27.0.

### Penetapan Hipotesis Statistik

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah, ditetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam penelitian ini sebagai berikut.

$H_0 : \beta \leq 0$  : Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

$H_a : \beta \geq 0$  : Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

### Rancangan Pengujian Hipotesis

Sebelum menguji hipotesis penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak dengan analisis statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Setelah data dipastikan terdistribusi normal, dilakukan analisis regresi linier sederhana untuk melakukan prediksi terhadap perubahan nilai variabel dependen jika nilai variabel independen diubah-ubah (Sugiyono, 2020, hal. 252). Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = SPIP

Setelah analisis regresi linier sederhana, dilakukan Analisis korelasi untuk menguji hubungan antara dua variabel menggunakan rumus korelasi Produk Moment (Pearson Correlation) dan analisis koefisien determinasi untuk mencari pengaruh (varians) variabel tertentu terhadap (varians) variabel lain (Sugiyono, 2020, hal. 214).

### **Penetapan Tingkat Signifikansi**

Dalam rangka melakukan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$ .

### **Penarikan Kesimpulan**

Kemudian, untuk menguji apakah hipotesis alternatif yang diajukan diterima atau tidak maka perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis menggunakan Uji t. Jika nilai signifikansi (Sig.)  $< 0,05$ , maka ada pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Sebanyak 30 kuesioner penelitian dalam bentuk tautan Google Form telah dibagikan ke 30 orang yang dipilih sebagai sampel penelitian. Berdasarkan jawaban responden, dilakukan beberapa langkah perhitungan untuk dapat menggambarkan masing-masing variabel.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Berikut adalah rangkuman jawaban responden per indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

#### **1. Lingkungan Pengendalian**

Berdasarkan jawaban responden, keharusan setiap pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memiliki kapabilitas dan

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif berada pada tingkat yang sangat baik, sedangkan mekanisme hubungan kerja/tata cara Kerjasama Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dengan instansi lain berada pada tingkat baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 907 dari maksimal sebesar 1050 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 86.38%. Jadi, lingkungan pengendalian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

#### **2. Penilaian Risiko**

Berdasarkan jawaban responden, pimpinan instansi menetapkan tujuan instansi secara keseluruhan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan kinerja tahunan dengan sangat baik, risiko terkait pengelolaan keuangan diidentifikasi dan dianalisis dengan sangat baik, serta adanya pengendalian atas jalannya setiap kegiatan instansi dalam mengelola keuangan dengan membuat prosedur pemantauan dan evaluasi risiko, didokumentasikan dan dilengkapi dengan saran serta rekomendasi oleh pimpinan instansi dengan sangat baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 385 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 85.56%. Jadi, penilaian risiko di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

#### **3. Kegiatan Pengendalian**

Berdasarkan jawaban responden, peningkatan kapabilitas pegawai dalam bidang pengelolaan keuangan melalui diklat/pelatihan berada pada level yang sangat baik, sedangkan pemisahan tugas pencatatan sesuai

dengan pemisahan fungsi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi berada pada level baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 1260 dari maksimal sebesar 1500 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 84.00%. Jadi, lingkungan pengendalian di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan jawaban responden, pimpinan instansi menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang memadai untuk menginformasikan setiap informasi penting dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai dengan sangat baik, pimpinan instansi juga selalu memberikan informasi dengan tepat sesuai tingkatan manajerial dengan sangat baik. Sementara itu, pengelolaan, pengembangan, dan pembaharuan sarana informasi dan komunikasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan setiap kebutuhan instansi berada pada level yang baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 372 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 82.67%. Jadi, informasi dan komunikasi di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

#### 5. Pemantauan

Berdasarkan jawaban responden, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah dengan sangat baik, pemisahan ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian internal juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Selain itu, ketanggapan pimpinan instansi terhadap temuan dan rekomendasi audit berada pada level yang sangat

baik dan segera ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 510 dari maksimal sebesar 600 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 85.00%. Jadi, pemantauan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

Penilaian responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara kumulatif mendapatkan total skor sebesar 3434 dari maksimal skor sebesar 4050 yang dapat diperoleh atau sebesar 84.79%. Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berikut adalah rangkuman jawaban responden per indikator Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

#### 1. Efisien

Berdasarkan jawaban responden, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat menggunakan sumber daya dan biaya dalam APBD berdasarkan nilai terendah dengan baik, adanya tenaga pembukuan akuntan di instansi yang menjadi faktor dipenuhinya batas waktu penyusunan laporan keuangan ke BPK, dan dijadikannya teknologi informasi menjadi faktor dipenuhinya batas penyusunan penyampaian keuangan. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 357 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 79.33%. Jadi, efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Baik.

#### 2. Ekonomis

Berdasarkan jawaban responden, tuntutan bagi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat untuk

menggunakan keuangan secara ekonomis sesuai dengan tujuan, prioritas dan kebutuhan instansi berada pada level yang sangat baik. Pernyataan ini mendapatkan skor 129 dari maksimal sebesar 150 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 86.00%. Jadi, indikator ekonomis dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

3. Efektif

Berdasarkan jawaban responden, APBD telah disusun berdasarkan pada kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan sangat baik, penyusunan dan penyampaian LKPD/APBD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dilakukan secara tepat waktu sesuai waktu yang ditentukan dengan sangat baik, serta APBD ditetapkan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 377 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 83.78%. Jadi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

4. Transparan

Berdasarkan jawaban responden, transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan adanya publikasi informasi APBD/LKPD melalui website dengan baik, pertanggungjawaban kinerja LKPD/APBD secara transparan kepada masyarakat dilakukan dengan sangat baik, dan masyarakat dapat mengakses informasi keuangan daerah melalui website instansi dengan baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh

indikator ini sejumlah 347 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 77.11%. Jadi, transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Baik.

5. Bertanggung Jawab

Berdasarkan jawaban responden, pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan dengan sangat baik, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah atau LKPD secara teratur dan tepat waktu dengan sangat baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 753 dari maksimal sebesar 900 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 83.67%. Jadi, indikator Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

6. Keadilan

Berdasarkan jawaban responden, pendistribusian anggaran dialokasikan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan sangat baik, serta status sosial dan gender menjadi salah satu tolok ukurnya. Selain itu, APBD disusun berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku umum dengan sangat baik. Secara keseluruhan, skor yang diperoleh indikator ini sejumlah 382 dari maksimal sebesar 450 skor yang dapat diperoleh, atau sebesar 84.89%. Jadi, indikator keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

Penilaian responden terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

secara kumulatif mendapatkan total skor sebesar 2345 dari maksimal skor sebesar 2850 yang dapat diperoleh atau sebesar 82.28%. Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat dikategorikan Sangat Baik.

### Uji Validitas

Dengan total responden sebanyak 30 orang, maka nilai  $r_{tabel}$  berdasarkan

tabel distribusi nilai  $r_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 5% dan  $N=30$  adalah sebagai berikut.

$Df = N-2$

$Df = 30-2 = 28$ , nilai  $r_{tabel}$  adalah 0.3610

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Berikut adalah hasil uji validitas variabel X, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah.

**Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel X**

No Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0.673	0.3610	Valid
2	0.650	0.3610	Valid
3	0.732	0.3610	Valid
4	0.548	0.3610	Valid
5	0.589	0.3610	Valid
6	0.606	0.3610	Valid
7	0.683	0.3610	Valid
8	0.554	0.3610	Valid
9	0.751	0.3610	Valid
10	0.644	0.3610	Valid
11	0.582	0.3610	Valid
12	0.582	0.3610	Valid
13	0.559	0.3610	Valid
14	0.774	0.3610	Valid
15	0.664	0.3610	Valid
16	0.670	0.3610	Valid
17	0.774	0.3610	Valid
18	0.626	0.3610	Valid
19	0.762	0.3610	Valid
20	0.583	0.3610	Valid
21	0.737	0.3610	Valid
22	0.625	0.3610	Valid
23	0.502	0.3610	Valid
24	0.725	0.3610	Valid
25	0.753	0.3610	Valid
26	0.364	0.3610	Valid
27	0.566	0.3610	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Berikut adalah hasil uji validitas variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Y**

No Item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0.488	0.3610	Valid
2	0.499	0.3610	Valid
3	0.726	0.3610	Valid
4	0.663	0.3610	Valid
5	0.798	0.3610	Valid
6	0.530	0.3610	Valid
7	0.755	0.3610	Valid

No Item	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
8	0.503	0.3610	Valid
9	0.531	0.3610	Valid
10	0.434	0.3610	Valid
11	0.554	0.3610	Valid
12	0.540	0.3610	Valid
13	0.622	0.3610	Valid
14	0.715	0.3610	Valid
15	0.720	0.3610	Valid
16	0.739	0.3610	Valid
17	0.538	0.3610	Valid
18	0.655	0.3610	Valid
19	0.705	0.3610	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Hasil perhitungan uji validitas variabel X dan Y sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas bahwa seluruh  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada nilai signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kuesioner penelitian ini valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Uji Reliabilitas**

Kriteria variabel reliabel adalah jika nilai koefisien reliabilitas Spearman Brown yang diperoleh positif dan signifikan, yaitu lebih besar dari 0,80.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas variabel X, yaitu sistem pengendalian internal pemerintah.

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Variabel**

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.889
		N of Items	14 <sup>a</sup>
	Part 2	Value	.879
		N of Items	13 <sup>b</sup>
Total N of Items			27
Correlation Between Forms			.869
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.930
	Unequal Length		.930
Guttman Split-Half Coefficient			.927

- a. The items are: X01, X02, X03, X04, X05, X06, X07, X08, X09, X10, X11, X12, X13, X14.
- b. The items are: X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X21, X22, X23, X24, X25, X26, X27.

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Berikut adalah hasil uji reliabilitas variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y**

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.810
		N of Items	10 <sup>a</sup>
	Part 2	Value	.853
		N of Items	9 <sup>b</sup>
Total N of Items			19
Correlation Between Forms			.717
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.835
	Unequal Length		.836
Guttman Split-Half Coefficient			.835

- a. The items are: Y01, Y02, Y03, Y04, Y05, Y06, Y07, Y08, Y09, Y10.
- b. The items are: Y10, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18, Y19.

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Hasil pengujian reliabilitas variabel X menunjukkan nilai koefisien reliabilitas Spearman Brown sebesar 0,927, sedangkan variabel Y menunjukkan nilai koefisien reliabilitas Spearman Brown sebesar 0,835. Kedua angka tersebut positif dan signifikan karena lebih besar dari 0,80. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kuesioner penelitian ini reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

**Uji Normalitas**

Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, jika probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal

**Tabel 7. Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		30	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	5.26477064	
Most Extreme Differences	Absolute	.079	
	Positive	.079	
	Negative	-.078	
Test Statistic		.079	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.200 <sup>d</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>e</sup>	Sig.	.899	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.891
		Upper Bound	.907

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,200, angka tersebut lebih besar daripada 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai residual penelitian ini berdistribusi normal.

**Analisis Regresi Linier Sederhana**

Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.489	10.668		1.921	.065
	SPIP	.504	.093	.716	5.430	<.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut, angka konstan dari Unstandardized Coefficients adalah sebesar 20,489. Artinya, jika terdapat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X), maka nilai Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 20.489. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,504. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X), maka nilai Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,504. Koefisien regresi yang bernilai

positif menunjukkan adanya hubungan positif antara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X) dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian, persamaan regresi linier sederhana dapat ditulis sebagai berikut.

$$Y = 20,489 + 0,504X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen diubah-ubah, dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, maka nilai variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah juga akan berubah.

**Analisis Koefisien Korelasi**

Berikut adalah hasil analisis korelasi untuk menguji hubungan antara dua variabel.

**Tabel 9. Hasil Analisis Korelasi**

**Correlations**

		SPIP	Pengelolaan Keuangan
SPIP	Pearson Correlation	1	.716**
	Sig. (2-tailed)		<.001
	N	30	30
Pengelolaan Keuangan	Pearson Correlation	.716**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	
	N	30	30

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Hasil perhitungan menunjukkan nilai *Pearson Correlation* sebesar 0,716. Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan tabel berikut.

**Tabel 10. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2020, hal. 248)

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien korelasi berada pada interval 0,60-0,799 dengan tingkat hubungan

kuat. Jadi, variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki korelasi dengan variabel dependen (Y) yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tingkat hubungan korelasi kuat dan bentuk hubungan positif.

### Analisis Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi berada pada interval nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, begitu juga sebaliknya.

**Tabel 11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 <sup>a</sup>	.513	.495	5.358

a. Predictors: (Constant), SPIP

Sumber: Data yang diolah tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai R square (R<sup>2</sup>) adalah 0,513 atau koefisien determinasi (Kd) sebesar 51,3%. Berarti, besarnya pengaruh variabel independen (X) yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 51,3%, sedangkan sisanya sebesar 49,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### Uji t

Variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05 atau 5%, artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai toleransi kesalahan sebesar 5%. Kemudian, membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan kriteria jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka ada pengaruh

antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.

**Tabel 12. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.489	10.668		1.921	.065
	SPIP	.504	.093	.716	5.430	<.001

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan

**Sumber: Data yang diolah tahun 2024**

Berdasarkan perhitungan uji t, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar  $<0,001$  yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian, nilai  $t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = n - 2 atau 30 - 2 = 28 adalah 1,701. Sementara itu, nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 5,430. Jadi, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dari hasil tersebut, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sudah melaksanakan kelima komponen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

2. Pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan.
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal ini berarti semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah, maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerahnya.

#### Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, diajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat ditingkatkan dengan membentuk mekanisme hubungan kerja/tata cara kerjasama dengan instansi lain dengan jelas yang dapat dituangkan dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP), mempertegas pemisahan tugas pencatatan sesuai dengan pemisahan fungsi yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dengan menerbitkan surat keputusan/surat penugasan dan monitoring tugas pegawai sesuai jabatannya, serta mengelola, mengembangkan, dan membarui sarana informasi dan komunikasi agar terjalin komunikasi yang baik dalam instansi.
2. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dapat lebih meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya dengan menyusun dan

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan nilai terendah, meningkatkan kompetensi tenaga pembukuan, dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditingkatkan dengan mempertanggungjawabkan kinerja instansi secara transparan kepada masyarakat melalui publikasi laporan keuangan, laporan kinerja, dsb. melalui website dan mempermudah masyarakat untuk mengakses laporan-laporan tersebut.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas objek penelitian dan mengubah atau menambahkan variabel lain agar diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hanafiah, R.R., Abdullah, S., dan Saputra, M. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 77-86.
- Ledo, D. dan Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kota Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, 25(2), 161-175.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1*

- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pratiwi, T.D., (14 November 2023). *Praktisi Hukum Sebut Pecah Lelang Perbaikan Basement DPRD Jabar Bisa Mengarah ke Motif Korupsi*. JabarEkspres.com. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2023/11/14/praktisi-hukum-sebut-pecah-lelang-perbaikan-basement-dprd-jabar-bisa-mengarah-ke-motif-korupsi>.
- Pujiono, D.S., Sukarno, H., dan Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintah Daerah. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 68-81.
- Rachmayanti, A.S. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kuningan*. (Skripsi Sarjana, Universitas Padjadjaran, 2016). Diakses dari <https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120110080077>.
- Sari, P., Patra, A.D.A., dan Ukkas, I. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Keuangan pada BLUD RSUD Sawerigading Kota Palopo. Universitas Muhammadiyah Palopo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi kedua)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. (2015). *Manajemen Keuangan Pemerintahan (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.